



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024

BPKAD KOTA YOGYAKARTA



BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA 2025

Berita Acara
Verifikasi Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta
Tahun 2024

Pada hari ini Rabu, Tanggal 31 Bulan Januari Tahun 2025 telah dilaksanakan penyusunan LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 dengan rincian hasil sebagai berikut:

URAIAN BAB	Verifikasi		Keterangan
	Sesuai	Tidak Sesuai	
<p><i>BAB I PENDAHULUAN</i></p> <p>Bab ini berisi paling sedikit mencakup Penjelasan umum Organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya (Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan) dan Sistematika LKIP</p>	✓		
<p><i>BAB II PERENCANAAN KINERJA</i></p> <p>Bab ini berisi paling sedikit mencakup Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan), Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2024 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)</p>	✓		
<p><i>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</i></p> <p>Bab ini berisi paling sedikit:</p> <p>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</p> <p>Capaian kinerja tahun 2024: Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;</p> <p>1. Evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis: Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun</p>	✓		

<p>ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; 3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/ sejenis (jika ada); 4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; 7. Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarus Utamaan Gender yang menysasar 5 kelompok rentan, yaitu: fakir miskin, disabilitas, anak, perempuan dan/atau lansia; 8. Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja; 9. Kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja; <p>B. REALISASI ANGGARAN:</p> <p>Realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja sesuai perubahan perjanjian kinerja tahun 2024.</p>			
<p>BAB IV PENUTUP</p> <p>Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai feedback dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja</p>	<p>✓</p>		

LAMPIRAN	✓		
1. Pohon Kinerja	✓		
2. Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024	✓		
3. Rencana Aksi Tahun 2024	✓		
4. Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2024	✓		
5. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2023	✓		
6. Dokumen lain yang diperlukan			

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,
Verifikator Bagian Organisasi

Ade Tarina Paramita, S.Pd.
Penata Muda Tk. I, III/b
NIP.199409242019032015

Yogyakarta, 31 Januari 2025
Perwakilan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

Erike Ocky DP.
Penata Tk. I, III/d
NIP.197310082005012008

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi. Capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempunyai 2 versi terkait target indikator kinerja. Secara ringkas dapat diuraikan pada tabel berikut :

1. Target Sasaran Strategis berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dan Keputusan Walikota Nomor 247 Tahun 2024 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dengan realisasi sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kuantabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	94,72	98,88	104,39
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	706.603.687.940,00	842.865.622.059,51	119,28

2. Target Sasaran Strategis berdasarkan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada target Pendapatan Asli Daerah dengan realisasi sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kuantabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	94,72	98,88	104,39
2	Meningkatnya pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	781.054.844.583,30	842.865.622.059,51	107,92

Terdapat perbedaan target sasaran strategis “Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat” antara kedua tabel di atas sebesar Rp.74.451.156.643,30 atau terdapat kenaikan target sebesar 11,05%. Hal ini disebabkan oleh perekonomian yang bangkit kembali terutama pada sektor pariwisata. Hunian hotel dan pengunjung restoran bertambah, secara otomatis mendongkrak pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Selanjutnya kami menyajikan target indikator kinerja sasaran “Nilai Pendapatan Asli Daerah” dan indikator kinerja program “Nilai Pendapatan Pajak Daerah” berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 karena angka tersebut adalah angka yang sesuai dengan perhitungan target terakhir sebelum APBD Perubahan ditetapkan. Perubahan Rencana Strategis hanya dilakukan sekali dalam satu tahun sehingga tidak bisa dilakukan perubahan lagi setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing indikator kinerja diatas, secara keseluruhan realisasi indikator kinerja tersebut dapat diwujudkan melebihi target yang telah ditetapkan.

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja instansi harus dibuat pada setiap akhir tahun yang merupakan kewajiban bagi instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibuat dan disusun sebagai tanggung jawab dalam pelaksanaan program maupun kegiatan. Laporan Kinerja disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta baik selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selama 1 (satu) tahun yang memuat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target dari program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran organisasi.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami terbuka menerima masukan dan saran untuk perbaikan sebagai bahan penyempurnaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun berikutnya. Kepada semua pihak yang telah banyak berperan dalam penyusunan ini kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, Januari 2025

Kepala

RADEN RORO ANDARINI, SE., M.Si.
NIP.19720317 199703 2 004

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah, organisasi BPKAD adalah sebagai berikut :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
- c. Bidang Anggaran terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan Anggaran
 2. Subbidang Pengendalian Anggaran
- d. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 1. Subbidang Kas Daerah
 2. Subbidang Belanja Daerah
- e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
 1. Subbidang Pemanfaatan Aset Daerah
 2. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian Aset Daerah
- f. Bidang Pelayanan, Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Pelayanan Pendapatan Daerah
 2. Subbidang Penetapan Pendapatan Daerah
- g. Bidang Pembukuan, Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

1. Subbidang Penagihan dan Keberatan Pendapatan Daerah
 2. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah
- h. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, terdiri dari :
1. Subbidang Akuntansi
 2. Subbidang Pelaporan

Setiap Unit Organisasi yang dipimpin oleh pejabat administrator terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Bagan Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur Organisasi



1.2 FUNGSI DAN TUGAS

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah

yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan daerah di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

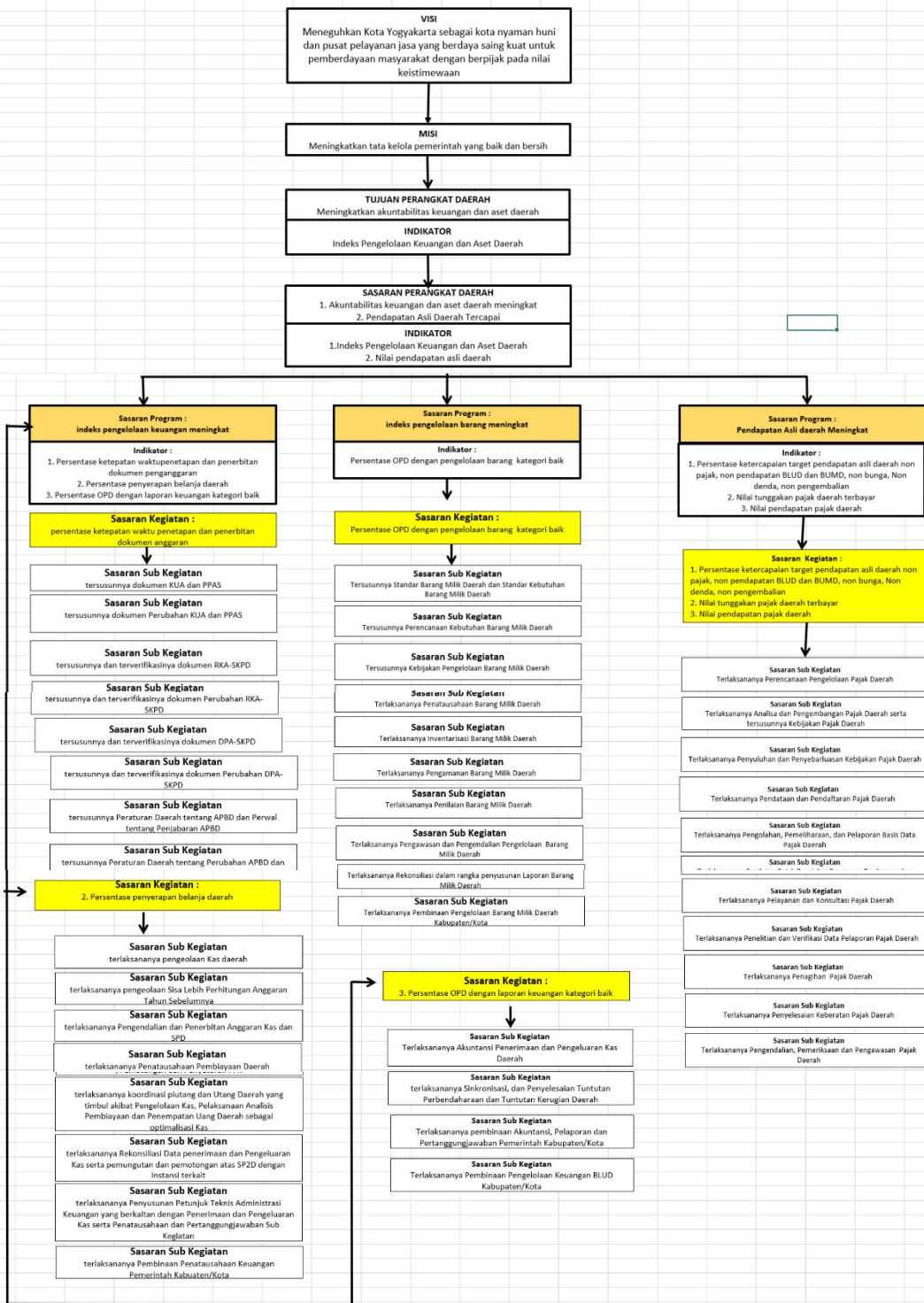
Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah selama kurun waktu satu tahun anggaran dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan bentuk tanggungjawab secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun dan menjadi alat evaluasi dalam pencapaian sasaran program dan output kegiatan.

Untuk menyelenggarakan tugasnya BPKAD mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan Daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah bidang keuangan Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi kesekretariatan BPKAD;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Dalam melaksanakan tugasnya BPKAD mengacu pada peta proses bisnis yang dituangkan dalam pohon kinerja sebagai berikut :

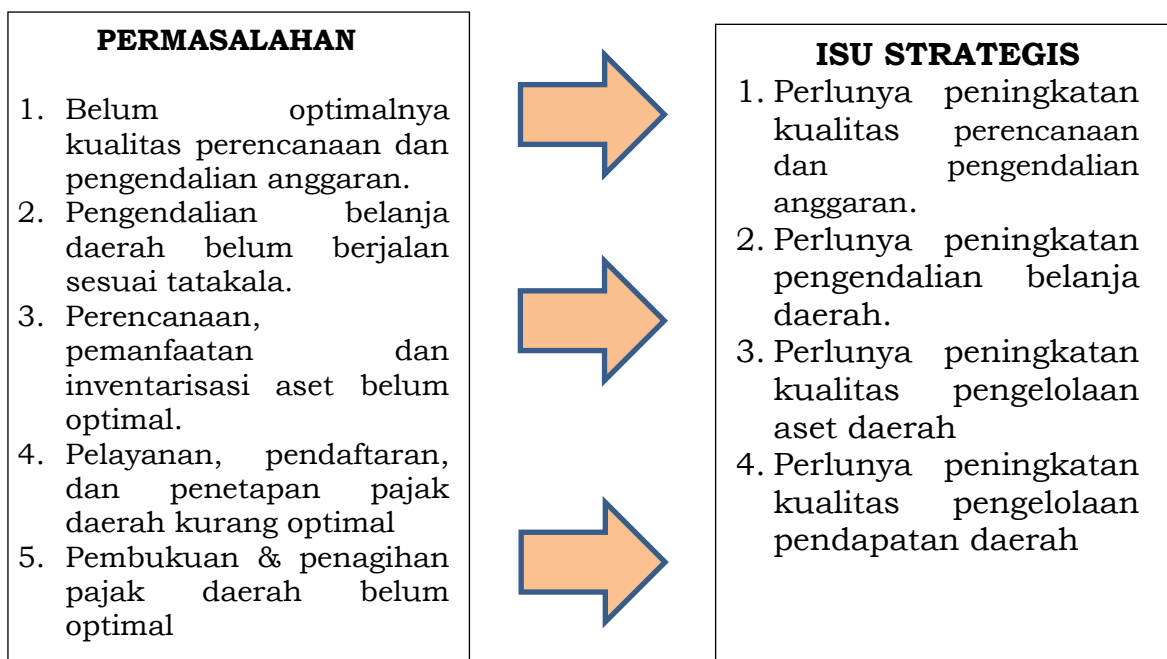
Gambar 1.2 Pohon Kinerja



1.2 ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta.

Adapun permasalahan dan isu strategis BPKAD pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berprinsip secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

1.3 KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai yang berpengaruh terhadap pelayanan dalam pencapaian kinerja perangkat daerah sebanyak 124 orang dengan data sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Pangkat dan Golongan Pegawai

JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
Kepala	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
Sekretaris	Pembina Tingkat I	IV/b	1 orang
Kepala Bidang	Pembina	IV/a	6 orang
Kepala Subbag/Subbid.	Pembina	IV/a	4 orang
	Penata Tingkat I	III/d	9 orang
Jabatan Fungsional Tertentu	Ahli Madya/Pembina	IV/b	1 orang
	Analisis Kebijakan Ahli Muda	IV/a	1 orang
	Perencana Ahli Muda	III/d	1 orang
	Pelaksana/Pengatur Tingkat I	II/d	1 orang
Jabatan Fungsional Umum	Penata Tk. I	III/d	9 orang
	Penata	III/c	9 orang
	Penata Muda Tk. I	III/b	25 orang
	Penata Muda	III/a	17 orang
	Pengatur Tk. I	II/d	2 orang
	Pengatur	II/c	37 orang

Sumber data : Subbagian Umum dan Kepegawaian, Des 2024

Adapun jumlah pegawai berdasarkan Tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Daftar Pendidikan Pegawai

PENDIDIKAN	JUMLAH
Master/S2	19 orang
Sarjana/S1	44 orang
Diploma IV/D4	1 orang
Diploma III/D3	46 orang
SLTA/ sederajat	14 orang

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Des 2024

1.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan Sarana dan Prasana untuk mendukung adalah :

Tabel 1.3
Daftar Sarana dan Prasarana Pendukung

JENIS	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan roda empat	10	buah	Baik
Kendaraan roda dua	48	buah	Baik
Sepeda	1	buah	Baik
Ruang rapat	6	buah	Baik
PC Unit	90	buah	Baik
PC Server	1	buah	Baik
UPS	75	buah	Baik
Printer	140	buah	Baik
Laptop	12	buah	Baik
LCD Proyektor	12	buah	Baik
Komputer	44	buah	Baik
Telepon	14	buah	Baik
Mesin Fax	1	buah	Baik
Rak Besi	34	buah	Baik
Rak Kayu	29	buah	Baik
Kamera Foto Digital	8	buah	Baik
Wireless Mic.	3	buah	Baik
Kursi Tamu	4	stel	Baik
Meja Rapat	76	buah	Baik
Meja Tulis	16	buah	Baik
Meja ½ biro	160	buah	Baik
Meja Komputer	54	buah	Baik
Meja Knap	9	buah	Baik
Meja Ketik	23	buah	Baik
Kursi Putar	74	buah	Baik
Kursi Besi	45	buah	Baik
Kursi kayu	37	buah	Baik
Kursi Lipat	210	buah	Baik
Almari besi	6	buah	Baik
Almari Kayu	2	buah	Baik
Almari Kaca	9	buah	Baik
Mesin Penghisap Debu	1	buah	Baik

Sumber data: Subbagian Umum dan Kepegawaian, Des 2024

1.5 KEUANGAN

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD pada tahun 2024 berasal dari APBD Kota Yogyakarta berdasarkan pergeseran anggaran perubahan ketiga. Alokasi hasil pergeseran anggaran perubahan ketiga sebesar Rp89.240.580.531,81 diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Alokasi anggaran disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4

Alokasi Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Alokasi (Rp)
Belanja Operasi	63.270.252.076,00
Belanja Modal	5.559.740.050,00
Belanja Tidak Terduga	16.774.956.816,00
Belanja Transfer	2.063.729.590,00
Jumlah	87.668.678.532,00

Tabel 1.5

Alokasi Belanja BPKAD pada Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024

Uraian	Alokasi (Rp)
Belanja Operasi	63.670.252.076,00
Belanja Modal	5.559.740.050,00
Belanja Tidak Terduga	17.946.858.815,81
Belanja Transfer	2.063.729.590,00
Jumlah	89.240.580.531,81

1.6 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Yogyakarta tahun 2024 disusun sebagai berikut :

1. Ringkasan Eksekutif yang berisi penjelasan capaian indikator sasaran.

2. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penjelasan umum Organisasi antara lain Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Sumber daya, Keadaan Pegawai, Keadaan Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Sistematika LAKIP.

3. BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan Rencana Anggaran Tahun 2024.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini berisi capaian kinerja tahun 2024 dan realisasi anggaran Tahun 2024 disertai dengan beberapa perbandingan antara target dan realisasi kinerja.

5. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi Kesimpulan, Rencana Tindak Lanjut, dan pemanfaatan laporan kinerja oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja

6. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama kurun waktu satu tahun adalah mulai dari pencermatan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan dokumen perencanaan tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari Tahun 2023-2026 dengan berorientasi terhadap hasil yang akan dicapai selaras dengan Misi Walikota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintah daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Renstra BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026.

2.1.1 Visi dan Misi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah :

“Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2023–2026 yaitu :

1. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.
2. Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.
3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa.
4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya.
6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.
8. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas.
9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.

Berkaitan dengan Misi dan program kerja Walikota tahun 2023–2026 untuk lima tahun ke depan, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada salah satu misi Walikota yaitu Misi ke 6 (enam) **“Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah**

yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum”

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi walikota dan wakil walikota.

Program adalah Rencana Strategis 5 (lima) tahunan yang dijabarkan dengan Renja. Renja adalah proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil Proses penetapan kegiatan diwujudkan dalam Rencana Kerja Tahunan yang dilaksanakan sebagai dasar perkiraan dalam menghitung alokasi anggaran dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan suatu program dan kegiatan yang telah direncanakan maupun ditetapkan dalam Rencana Kerja, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

1. Perencanaan anggaran hendaknya disusun untuk mencapai output dalam sub-sub kegiatan yang merupakan aktifitas yang berkorelasi dan menunjang output kegiatan untuk keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai;
2. Konsistensi dan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan;
3. Pemetaan secara cermat potensi resiko yang akan terjadi ketika pelaksanaan kegiatan dilakukan.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah.

Berdasarkan hasil monitoring tindak lanjut evaluasi AKIP tahun 2023, Inspektorat telah merekomendasikan untuk menetapkan tujuan yang mewadahi seluruh sasaran dalam Renstra. Tindak lanjut yang dilakukan adalah mengevaluasi dan merumuskan tujuan yang mewadahi seluruh sasaran dalam Renstra sebagai berikut : “Meningkatkan akuntabilitas keuangan, aset, dan pendapatan asli daerah”. Namun tindak lanjut ini perlu dituangkan dalam reviu Renstra, sehingga belum tersaji dalam LAKIP tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan dengan sasaran strategis telah mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kerja Tahunan disusun sebelum mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan telah memuat sasaran, indikator sasaran, target kinerja sasaran, program, target kinerja kegiatan serta pagu anggaran. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka ditetapkan sasaran strategis dengan menggunakan Indikator Sasaran berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 dan berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 Di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, maka terdapat beberapa perbaikan yang tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Target

Tujuan :	1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah 2. Meningkatnya pendapatan asli daerah 3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			
Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja Utama	Program
Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94,72	Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	1. Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Pengelolaan Barang Milik Daerah
Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	706.603.687.940	Pendapatan asli daerah meningkat	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B Nilai		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Cara pengukuran :

1. Sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah“ : (program Pengelolaan keuangan daerah : 25% kinerja kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah + 25% kinerja kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah + 25% kinerja kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah + 25% kinerja program Pengelolaan barang milik daerah kegiatan Pengelolaan barang milik daerah) dikali 100.
2. Sasaran strategis “Meningkatnya pendapatan asli daerah" diukur dari Nilai Pendapatan Asli Daerah. Untuk target nilai

pendapatan asli daerah mendasarkan pada target yang ditetapkan dalam APBD Perubahan.

3. Sasaran strategis “Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” diukur berdasarkan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan Tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2024 yakni meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah yang di dalamnya termasuk peningkatan pendapatan pajak daerah.

Tujuan merupakan penjabaran secara nyata sebagai pelaksanaan program, sedangkan sasaran strategis merupakan penjabaran dari misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang telah ditetapkan serta akan dijabarkan dan dapat dihasilkan.

Dalam memformulasikan program dan kegiatan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta akan lebih baik apabila mengetahui sumberdaya yang ada dan kemampuan yang dimiliki BPKAD Kota Yogyakarta, untuk mengampu pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang sesuai dengan Misi Walikota yaitu Misi ke 6 (enam) **“Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.”**

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Target tahunan			
				2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Indeks Pengelolalan Keuangan dan Aset Daerah	%	93.92 Skala 1-100	94.72 Skala 1-100	95.40 Skala 1-100	95.90 Skala 1-100
2	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	658.724.912.873	706.603.687.940	739.853.700.334	782.776.222.008
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Nilai	B	B	B	B

Sumber data: Kepwal Nomor 261 Tahun 2023 & Kepwal 247 Tahun 2024

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Penetapan sasaran strategis diperlukan sebagai dasar untuk penyusunan rencana kinerja dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah serta meningkatkan pendapatan pajak daerah. Agar sasaran dapat tercapai dan dapat terukur dengan berdasarkan sasaran strategis, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan pendapatan asli daerah;

3. Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bahwa setiap OPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna perbaikan kinerja serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Indikator Kinerja Utama (Sasaran Indikator) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Yogyakarta adalah:

1. Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Nilai Pendapatan Asli Daerah.
3. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tabel 2.3
Indikator Sasaran Strategis BPKAD Kota Yogyakarta

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Pengelolaan keuangan daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
			Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
		Pengelolaan barang milik daerah	Pengelolaan barang milik daerah
2.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Pengelolaan pendapatan daerah	Pengelolaan pendapatan daerah
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran Strategis Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah dilaksanakan melalui program Pengelolaan keuangan daerah dan program Pengelolaan barang milik daerah. Sasaran Strategis Meningkatnya pendapatan asli daerah dilaksanakan melalui program Pengelolaan pendapatan daerah.

Cara pengukuran indikator kinerja utama dengan fomula indikator tujuan dihitung dengan presentase kinerja suatu perangkat daerah.

Penetapan target kinerja sudah beberapa kali diubah melalui reuiu penetapan kinerja yang dituangkan dalam metadata indikator sasaran dan program perangkat daerah. Formula yang digunakan antara lain adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Formula Indikator Program

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran = $\frac{\text{Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu}}{\text{jumlah dokumen penganggaran}} \times 100\%$	-jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dengan target : 4 -jumlah dokumen penganggaran : 4
Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = $\frac{\text{Realisasi belanja daerah}}{\text{perencanaan belanja daerah}} \times 100\%$	-realisasi belanja daerah tahun n -perencanaan belanja daerah tahun n
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik = $\frac{\text{Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik}}{\text{jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$	-Jumlah OPD laporan keuangan kategori baik, dengan target : 39 - jumlah seluruh OPD : 41

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data
Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik, dengan target : 39 jumlah seluruh OPD : 41
Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	(Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian / Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian) x 100%	- Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian - Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian
Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar
Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Pencapaian kinerja perangkat daerah untuk setiap perjanjian kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024.

2. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD.
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja serta solusi yang akan dilakukan.

Program dan kegiatan yang tertulis pada Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja Perangkat Daerah, yang merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang ada.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja BPKAD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
BPKAD Kota Yogyakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	94,72 Skala 1-100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp706.603.687.940,00
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai

Tabel 2.6
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
BPKAD Kota Yogyakarta

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	94,72 Skala 1-100
2.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp706.603.687.940,00
3.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B Nilai

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi tugas dan penerima tugas untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam melaksanakan program maupun kegiatan

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2024

2.3.1 Anggaran Belanja Perangkat Daerah

Rencana Kinerja Tahun 2024 merupakan rencana kerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Rencana Kerja merupakan cerminan dari rencana program ataupun kegiatan serta sasaran dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta adalah Perangkat Daerah yang mengampu salah satu Misi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta yang terpilih yaitu **“Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.”**

Sesuai dengan rincian tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Yogyakarta melaksanakan tugas sesuai rencana yang memuat informasi tentang :

1. Sasaran yang akan dicapai dalam tahun yang bersangkutan beserta indikator kinerja, sasaran, dan rencana kerja agar sesuai target yang dikehendaki.
2. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun.

Anggaran belanja BPKAD tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Proporsi Anggaran Belanja BPKAD pada APBD Perubahan Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi	63.270.252.076,00	72,17%
Belanja Modal	5.559.740.050,00	6,34%
Belanja Tidak Terduga	16.774.956.816,00	19,13%
Belanja Transfer	2.063.729.590,00	2,36%
Jumlah	87.668.678.532,00	100%

Berdasarkan kebutuhan belanja APBD, maka anggaran BPKAD mengalami pergeseran anggaran pada Belanja Tidak Terduga, sehingga anggaran BPKAD menjadi seperti di bawah ini :

Tabel 2.8
Proporsi Anggaran BPKAD Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024

Uraian	Target (Rp)	Prosentase
Belanja Operasi	63.670.252.076,00	71,35%
Belanja Modal	5.559.740.050,00	6,23%
Belanja Tidak Terduga	17.946.858.815,81	20,11%
Belanja Transfer	2.063.729.590,00	2,31%
Jumlah	89.240.580.531,81	100%

Anggaran Pergeseran Perubahan APBD Ketiga sebesar Rp89.240.580.531,81 untuk mendanai 4 Program, 11 Kegiatan, 84 Sub Kegiatan. Berikut ini Anggaran Program, Kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.9
Anggaran Murni, Anggaran Perubahan dan Anggaran Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024 per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran Perubahan (Rp)
I	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	52.143.381.598	53.106.602.502	53.506.602.502
A	A	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.432.000	3.432.000	3.432.000
1	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	990,000	990,000	990,000
2	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	330,000	330,000	330,000
3	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	330,000	330,000	330,000
4	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	330,000	330,000	330,000
5	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	330,000	330,000	330,000
6	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	792.000	792.000	792.000
7	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	330,000	330,000	330,000
B	B	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.517.870.500	43.923.053.500	43.923.053.500
7	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.515.725.500	43,920.908.500	43,920.908.500

8	2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	660.000	660.000	660.000
9	3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	165.000	165.000	165.000
10	4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	165.000	165.000	165.000
11	5	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	330.000	330.000	330.000
12	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	660.000	660.000	660.000
13	7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	165.000	165.000	165.000
C	C	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.980.000	4.860.000	4.860.000
14	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	2.880.000	2.880.000
15	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	660.000	660.000	660.000
16	3	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1.320.000	1.320.000	1.320.000
D	D	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	882.616.335	972.286.335	972.286.335
17	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.534.500	13.839.000	13.839.000
18	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	492.085.035	448.285.035	448.285.035
19	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	23.341.800	23.341.800	23.341.800
20	4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	167.325.000	289.140.500	289.140.500
No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran Perubahan (Rp)
21	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.500.000	174.120.000	174.120.000
22	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	47.830.000	23.560.000	23.560.000
E	E	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.318.035.664	7.748.711.744	8.148.711.744
23	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	215.440.000	205.416.000	205.416.000
24	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.610.950.000	7.100.150.000	7.500.150.000
25	3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	491.645.664	443.145.744	443.145.744
F	F	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	419.447.099	454.258.923	454.258.923
26	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	68.584.000	53.584.000	53.584.000
27	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	174.020.000	159.020.000	159.020.000
28	3	Pemeliharaan Mebel	0	16.000.000	16.000.000
29	4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	92.400.000	92.400.000	92.400.000
30	5	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	7.500.000	5.990.000	5.990.000

31	6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.943.099	125.754.923	125.754.923
II	II	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	26.934.074.089	19.654.081.580	20.825.983.579,81
G	G	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	159.666.496	132.701.174	132.701.174
32	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	8.225.000	2.525.000	2.525.000
33	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	8.225.000	2.525.000	2.525.000
34	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	6.600.000	6.600.000	6.600.000
35	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	6.600.000	2.310.000	2.310.000
36	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	3.025.440	3.025.440	3.025.440
37	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	3.025.440	4.276.734	4.276.734
38	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	68.229.000	63.539.000	63.539.000
39	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	49.175.000	42.345.000	42.345.000
40	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6.561.616	5.555.000	5.555.000
No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran Perubahan (Rp)
H	H	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	26.516.959.590,00	19.291.146.506,00	20.463.048.405,81
41	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	26.124.425.590	18.899.382.406	20.071.284.405,81
42	2	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	660.000	660.000	660.000
43	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	660.000	660.000	660.000
44	4	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	153.660.000	153.660.000	153.660.000
45	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	47.896.000	47.896.000	47.896.000
46	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	51.775.000	51.775.000	51.775.000
47	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2.783.000	2.783.000	2.783.000

48	8	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1.540.000	1.540.000	1.540.000
49	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	123.300.000	123.300.000	123.300.000
50	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	5.640.000	5.640.000	5.640.000
51	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	4.620.000	4.620.000	4.620.000
I	I	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	257.448.000	230.234.000	230.234.000
52	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	116.524.000	125.634.000	125.634.000
53	2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	2.280.000	2.280.000	2.280.000
54	3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9.108.000	10.419.000	10.419.000
55	4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	35.776.000	19.223.000	19.223.000
56	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	4.224.000	3.584.000	3.584.000
No5 7.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran Perubahan (Rp)
58	6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	67.346.000	65.276.000	65.276.000
59	7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	26.376.000	26.310.000	26.310.000
III	III	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.863.460.450	11.258.976.450	11.258.976.450
J	J	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.863.460.450	11.258.976.450	11.258.976.450
60	1	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	74.089.000	74.089.000	74.089.000
61	2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	83.285.000	1.936.000	1.936.000
62	3	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	721.485.820	3.167.660.820	3.167.660.820
63	4	Penatausahaan Barang Milik Daerah	7.654.000	7.654.000	7.654.000
64	5	Inventarisasi Barang Milik Daerah	199.688.032	199.688.032	199.688.032
65	6	Pengamanan Barang Milik Daerah	2.287.460.520	3.876.238.820	3.876.238.820
66	7	Penilaian Barang Milik Daerah	327.700.000	392.700.000	392.700.000
67	8	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	285.140.000	129.620.000	129.620.000

68	9	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1.768.781.550	3.301.213.250	3.301.213.250
69	10	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	29.712.528	29.712.528	29.712.528
70	11	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	78.464.000	78.464.000	78.464.000
IV	IV	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2.065.799.000	3.649.018.000	3.649.018.000
K	K	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2.065.799.000	3.649.018.000	3.649.018.000
71	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	5.522.000	5.522.000	5.522.000
72	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	92.090.000	183.790.000	183.790.000
73	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	217.153.000	268.446.000	268.446.000
74	4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	60.179.000	60.179.000	60.179.000
75	5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	366.172.000	409.502.000	409.502.000
76	6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	7.150.000	7.150.000	7.150.000
77	7	Penetapan Wajib Pajak Daerah	5.049.000	5.049.000	5.049.000
78	8	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	387.180.000	383.810.000	383.810.000
79	9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	73.110.000	1.473.110.000	1.473.110.000
80	10	Penagihan Pajak Daerah	323.945.000	312.759.000	312.759.000
81	11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	111.805.000	109.605.000	109.605.000
82	12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	392.508.000	393.356.000	393.356.000
No.	No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Anggaran Pergeseran Perubahan (Rp)
83	13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	23.936.000	23.936.000	23.936.000
84	14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	0	12.804.000	12.804.000
JUMLAH			87.006.715.134	87.668.678.532	89.240.580.531,81

2.3.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.10
Anggaran Belanja per Sasaran Strategis
berdasarkan Anggaran Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024

No.	Sasaran	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	32.084.960.029,81	35,95%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja sebesar Rp89.240.580.531,81
1.1.	<i>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	20.825.983.579,81	64,91%	
1.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	132.701.174,00	0,64%	
1.1.2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	20.463.048.405,81	98,26%	
1.1.3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	230.234.000,00	0,11%	
1.2.	<i>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>	11.258.976.450,00	35,09%	
1.2.1.	Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.258.976.450,00	35,09%	
2.	Pendapatan Asli Daerah meningkat	3.649.018.000,00	4,09%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja sebesar Rp89.240.580.531,81
2.1	<i>Program Pengelolaan pendapatan Daerah</i>	3.649.018.000,00	4,09%	
2.1.1	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.649.018.000,00	4,09%	
3.	Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meningkat	53.506.602.502,00	59,96%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja sebesar Rp89.240.580.531,81
3.1	<i>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	53.506.602.502,00	59,96%	
3.1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.432.000,00	0,01%	
3.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.923.053.500,00	82,09%	
3.1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.860.000,00	0,01%	
3.1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.286.335,00	1,81%	
3.1.5	Kegiatan Penyediaan Jasa	8.148.711.744,00	15,23%	

3.1.6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.258.923,00	0,85%	
-------	---	----------------	-------	--

Anggaran belanja untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp32.084.960.029,81 atau 35,95%, yang terdiri dari anggaran untuk Program Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp20.825.983.579,81 atau 64,91% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah sebesar Rp11.256.976.450,00 atau 35,09%. Sedangkan anggaran belanja untuk mendukung pencapaian sasaran “Pendapatan Asli Daerah meningkat” sebesar Rp3.649.018.000,00 atau 4,09%. Anggaran belanja untuk mendukung sasaran “Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meningkat” yang didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp53.506.602.502,00 atau 59,96%.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mengampu 4 (empat) program terdiri dari 1 (satu) program penunjang dengan 6 (enam) kegiatan dan 32 sub kegiatan serta 3 (tiga) program utama dengan 5 (lima kegiatan) dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan, dengan anggaran belanja sebagai berikut :

Tabel 2.11
Anggaran Belanja per Sasaran Program

No.	Program	Anggaran (Rp)	Prosentase	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	20.825.983.579,81	23,34%	Prosentase dihitung berdasarkan total belanja sebesar Rp89.240.580.531,81
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.258.976.450,00	12,61%	
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.649.018.000,00	4,09%	
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	53.506.602.502,00	59,96%	

Program Pengelolaan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp20.825.983.579,81 atau 23,34% yang dihitung dari total belanja. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran dianggarkan sebesar Rp132.701.174,00, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dianggarkan sebesar Rp20.463.048.405,81 dan kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dianggarkan sebesar Rp230.234.000,00.

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dianggarkan sebesar Rp11.258.976.450,00 atau 12,61% dari total belanja yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar 3.649.018.000,00 atau 4,09% dari total belanja yang digunakan untuk kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Kemudian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp53.506.602.502,00 atau 59,96% dari total belanja yang dipergunakan untuk mendukung terlaksananya program-program utama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan yang digunakan untuk menentukan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Penilaian Akuntabilitas Kinerja berdasarkan hasil pengukuran Kinerja terhadap capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2024 diperoleh melalui analisis pengukuran dengan cara :

1. Membandingkan antara target dan realisasi pada Tahun 2024.
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
3. Hasil pengukuran capaian kinerja untuk setiap persyaratan kinerja dari sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh BPKAD dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya kuantabilitas Keuangan dan Aset Daerah	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	94,72	98,88	104,39
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	706.603.687.940,00	842.865.622.059,51	119,28
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	B	B	100,00

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Kuangan dan Aset Daerah					

Dari tabel di atas, terdapat tiga sasaran yang terbagi dalam tiga indikator. Pada tahun 2024, Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah telah memenuhi target yang ditetapkan yaitu 98,88% dari target sebesar 94,72% atau sebesar 104,39% dari target. Sementara itu, Nilai Pendapatan Asli Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 247 Tahun 2024 telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 119,28%. Untuk hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat memperoleh nilai B sehingga telah memenuhi target 100%.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Tahun 2024 berdasarkan Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	94,72	98,88	104,39
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Rp	781.054.844.583,30	842.865.622.059,51	107,92
3	Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	B	B	100,00

Realisasi nilai pendapatan asli Daerah berdasarkan target anggaran pergeseran perubahan APBD sebesar 107,92% sehingga telah melebihi target yang ditetapkan. Indikator kinerja program sebagai ukuran

keberhasilan dari sasaran program BPKAD beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Program

Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Target yang dihasilkan
Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran = Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	-jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu : 4 -jumlah dokumen penganggaran : 4	$(4:4) \times 100\%$	100%
Indikator Program	Formula Indikator Program	Sumber data	Perhitungan	Realisasi yang dihasilkan
Persentase penyerapan belanja daerah	Persentase penyerapan belanja daerah = Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	-realisasi belanja daerah tahun n -perencanaan belanja daerah tahun n	Perhitungan realisasi : $\frac{2.168.217.552.145}{2.270.266.425.605} \times 100\%$	95,50%
Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	-Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik, dengan target : 39 - jumlah seluruh OPD : 41	Perhitungan realisasi : $(41:41) \times 100\%$	100%
Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik = Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik, dengan target : 39 jumlah seluruh OPD : 41	Perhitungan realisasi : $(39:41) \times 100\%$	95,12%
Persentase ketercapaian	(Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah	- Nilai ketercapaian target pendapatan asli	100%	113,03%

target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian	non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian / Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian) x 100%	daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian - Realisasi pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian		
Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar	Rp16.000.000.000,-	Rp28.758.278.740,-
Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Rp481.723.900.000,-	Rp575.834.201.429,-
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	A Nilai

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA STRATEGIS

Analisis Capaian Kinerja Strategis ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

Perencanaan untuk pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan sasaran strategis dapat diformulasikan dalam dua indikator kinerja, yaitu **akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset meningkat serta peningkatan pajak daerah**. Indikator sesuai kriteria spesifik, dapat dinilai, dan diukur, berorientasi pada hasil dalam jangka waktu tertentu.

Sasaran Strategis yang telah dicapai yaitu :

1. Optimalisasi pendapatan asli daerah dengan indikator nilai pendapatan asli daerah tahun 2024 sebesar Rp842.865.622.059,51

dari target pendapatan asli daerah yang merujuk pada Peraturan Walikota tentang Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024 sebesar Rp781.054.844.583,30 yaitu sebesar 107,92%.

2. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah, dengan indikator sasaran Penilaian audit eksternal dengan target renstra adalah Wajar dan capaian kinerjanya Wajar Tanpa Kecuali (WTP) dan telah meraih WTP ke 15 (lima belas).
3. Optimalisasi pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas, dengan target 95,12% telah terealisasi sebesar 95,12% atau dengan kata lain sudah memenuhi target 100%.
4. Optimalisasi pajak daerah dengan indikator realisasi pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp575.834.201.429,00 dari target pajak daerah yang merujuk pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2024 sebesar Rp532.000.000.000,00 dengan capaian 108,24%.

Tabel 3.3
Realisasi Pajak Daerah
Berdasarkan Anggaran Perubahan APBD TA. 2024

No.	JenisPajak	Target	Realisasi	%
1.	Pajak Reklame	6.500.000.000	8.610.341.390	132,47
2.	Pajak Air Tanah	4.000.000.000	4.101.912.273	102,55
3.	Pajak Bumi & Bangunan	118.000.000.000	125.590.296.203	106,43
4.	BPHTB	64.500.000.000	63.670.741.993	98, 71
5.	PBJT :	339.000.000.000	373.860.909.570	110,28
	PBJT-Makanan dan Minuman	85.000.000.000	91.034.025.025	107,10
	PBJT-Tenaga Listrik	58.000.000.000	61.629.024.898	106,26
	PBJT-Jasa Perhotelan	183.000.000.000	205.248.934.658	112,16
	PBJT-Jasa Parkir	3.000.000.000	3.313.081.769	110,44
	PBJT-Jasa Kesenian	10.000.000.000	12.635.843.220	126,36
	JUMLAH	532.000.000.000	575.834.201.429	108,24

5. Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat untuk tahun 2024 memperoleh nilai B sehingga memenuhi target capaian 100%.

6. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperoleh nilai A sehingga memenuhi target capaian 100%.

BPKAD melakukan reviu terhadap Indikator kinerja program yang mendukung indikator kinerja sasaran melalui rapat koordinasi internal maupun eksternal yang melibatkan stakeholder BAPPEDA dan Bagian Organisasi. Pemantauan dan evaluasi hasil rencana kerja dilakukan setiap tribulan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang terdapat pada lampiran Laporan Akuntabilitas Kinerja ini.

Analisis Capaian Kinerja lainnya ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran Perangkat Daerah guna memperbaiki kinerja yang telah dilakukan dan untuk peningkatan fungsi utama SKPD.

Selain pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta juga menjalankan ketugasan dalam pelayanan dibidang pajak daerah yang tercantum dalam uraian tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan keuangan meliputi pengelolaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan dengan indikator dan target kinerja masing-masing. Pengelolaan aset daerah meliputi perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset. Pengelolaan keuangan dan aset daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan akan mampu menghasilkan efektifitas dan efisiensi belanja daerah. Indikator Kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan pada kriteria sebuah indikator program, output dan target output. Untuk mengukur keberhasilan tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta mempertimbangkan objektifitas

penilaian berdasarkan pada keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Yogyakarta

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR PROGRAM	PROGRAM	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan keuangan dan aset daerah Target : 94,72%	Jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	1. Pengelolaan Keuangan Daerah	100,00%	100,00%	100,00%
		Realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%		92,49%	95,50%	103,25%
		Jumlah OPD dengan Laporan Keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%		97,56%	100%	102,50%
		Jumlah OPD dengan Laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100 %	2. Pengelolaan barang milik daerah aset	95,12%	100%	105,13%
Pendapatan Pajak Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda, non pengembalian	Pengelolaan pendapatan daerah	100%	113,03%	113,03%
		Nilai Tunggalan Pajak Daerah Terbayar		100%	179,74%	179,74%
		Nilai Pendapatan Pajak Daerah		100%	108,24%	108,24%

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian realisasi Indikator Kinerja Utama melebihi target yang ditetapkan. Untuk capaian IKU Indeks Pengelolaan keuangan dan aset daerah sebesar 104,39%, sedangkan untuk capaian IKU Nilai pendapatan asli daerah sebesar 107,92%.

Untuk realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2024 sebesar Rp575.834.201.429,00 atau 108,24% dari target yang dianggarkan sebesar Rp532.000.000.000,00 Apabila dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota nomor 467 Tahun 2024 sebesar Rp481.723.900.000,00 maka capaian untuk pendapatan pajak daerah 119,54%.

Dalam mengukur capaian indikator “Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah” Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta tahun 2024 didasarkan pada :

1. Angka maksimum capaian indikator kinerja ditetapkan 100%, penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja, sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100.
2. Rumusan yang digunakan untuk menghitung presentase capaian target indikator kinerja, seperti tersebut pada Formula indikator program adalah :

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \text{Realisasi} : \text{target} \times 100\%$$

3. Cara menyimpulkan hasil pengukuran kinerja untuk pencapaian sasaran kinerja, bahwa kinerja masing-masing program untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah kegiatan pengelolaan keuangan dan aset dengan bobot 100 % dari nilai masing-masing program pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yaitu dengan formula indikator sebagai berikut :

25% dari kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah + 25% kinerja kegiatan koordinasi dan penyusunan perbendaharaan daerah + 25% kinerja kegiatan

koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah + 25% kinerja kegiatan pengelolaan barang milik daerah daerah. Dari Capaian Kinerja tersebut diatas maka capaian dapat dihitung sebagai berikut :

- kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah:

$$25\% \times 100\% = 25,00\%$$

- kegiatan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah :

$$25\% \times 95,50\% = 23,88\%$$

- kegiatan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah :

$$25\% \times 100\% = 25,00\%$$

- kegiatan pengelolaan barang milik daerah daerah :

$$25\% \times 100\% = 25,00\%$$

Maka Capaian kinerja pengelolaan keuangan untuk indikator sasaran pada IKU "indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah" telah mencapai sebesar $25,00\% + 23,88\% + 25,00\% + 25,00\% = \mathbf{98,88\%}$

4. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut dengan asumsi bahwa :

85 s/ 100 : sangat berhasil

70 s/d 85 : Berhasil

55 s/d 70 : Cukup berhasil

0 s/d 55 : Kurang berhasil

Dengan Nilai sebesar 98,88% Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta memiliki predikat "**sangat berhasil**". Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja, dilakukan analisis kinerja untuk pencapaian kinerja yang memberikan informasi lebih transparan dalam capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

Dalam mengukur capaian indikator “Nilai Pendapatan Asli Daerah” tahun 2024, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merujuk pada Peraturan Walikota tentang Pergeseran Perubahan APBD Ketiga Tahun 2024 dengan target sebesar Rp781.054.844.583,30 dan terealisasi sebesar Rp842.865.622.059,51 atau 107,92%.

3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan target dan realisasi program dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Perbandingan realisasi kinerja indikator program

Program PD (Program berdasarkan Kepmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	2023		2024	
			Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran	jumlah dokumen penganggaran yang tepat waktu dibagi jumlah dokumen penganggaran dikali 100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase penyerapan belanja daerah	realisasi belanja daerah dibagi perencanaan belanja daerah dikali 100%	92,49%	94,41%	92,49%	95,50%
	Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan keuangan kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	97,56%	100%	97,56%	100%
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	Jumlah OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik dibagi jumlah seluruh OPD dikali 100%	92,68%	92,68%	95,12%	95,12%

Program PD (Program berdasarkan Keppmendagri 50 Th 2020)	Indikator Program PD	Formula Indikator Program PD	2023		2024	
			Target Program PD	Realisasi	Target Program PD	Realisasi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, non bunga, Non denda, non pengembalian	Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non Bunga, Non denda, non pengembalian	100,00%	113,79%	100,00%	113,03%
	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	Nilai Tunggakan Pajak Daerah Terbayar	16.000.000.000	23.367.083.307,14	16.000.000.000	28.758.278.740
	Nilai pendapatan Pajak Daerah	Nilai Pendapatan Pajak Daerah	467.006.800.000	550.547.450.604	532.000.000.000	575.834.201.429
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai

Realisasi program Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi 3 indikator yaitu :

1. Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran tahun 2024 terealisasi 100% sama dengan tahun 2023.
2. Persentase penyerapan belanja daerah tahun 2024 terealisasi sebesar 95,50% mengalami kenaikan dibanding tahun 2023.
3. Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik tahun 2024 terealisasi sebesar 100% sama dengan tahun 2023.

Realisasi program Pengelolaan Barang milik Daerah dengan indikator Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik tercapai 100% atau melebihi target yang ditetapkan dengan capaian 105,13%.

Indikator program Pengelolaan Pendapatan daerah ada 3 indikator yaitu :

1. Realisasi ketercapaian pendapatan asli daerah non pajak dan non pendapatan BLUD dan BUMD Non bunga, Non denda, non pengembalian sebesar Rp85.343.164.803,00 atau 113,03% dari target sebesar Rp75.503.991.760,00.
2. Pendapatan pajak ditargetkan sebesar Rp532.000.000.000,00 terealisasi atau 108,24% yang terdiri dari Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Wallet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, PBJT-Makanan dan minuman, PBJT-Parkir, PBJT-Tenaga Listrik, PBJT-Kesenian.
3. Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar ditargetkan sebesar Rp 16.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp28.758.278.740,00 atau mencapai target sebesar 179,74%

Perbandingan target dan realisasi sasaran dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Perbandingan realisasi kinerja indikator sasaran

Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Metodologi	Formula Indikator Sasaran PD	2023		2024	
				Target Sasaran PD	Realisasi	Target Sasaran PD	Realisasi
Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	- kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran dihitung dari : persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran - kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer dihitung dari : persentase penyerapan belanja daerah - kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dihitung dari : persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik - kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset dihitung dari : persentase pemenuhan kebutuhan barang daerah	(25% kinerja program perencanaan dan pengendalian anggaran + 25% kinerja pengendalian belanja daerah dan pengelolaan dana transfer + 25% kinerja program pengelolaan pembiayaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD + 25% kinerja program perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset) dikali 100	93,92	96,77	94,72	98,88
Pendapatan Asli Daerah Tercapai	Nilai Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Nilai Pendapatan Asli Daerah di tahun n	695.268.581.456,00	803.673.277.479,53	706.603.687.940,00	842.865.622.059,51
Reformasi Birokrasi Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B	B	B	B

3.2.2 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Rencana Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

BPKAD Kota Yogyakarta melaksanakan tugasnya berdasarkan Rencana strategis yang Perbandingan realisasi kinerja dengan Rencana Strategis disajikan dalam kurun waktu 5 tahun. Dalam waktu 5 tahun terjadi beberapa perubahan Indikator sasaran yang semula berupa prosentase menjadi angka capaian realisasi.

Tabel 3.7
Persentase Target Kinerja Tahunan Jangka Menengah terhadap Realisasi Tahun 2023-2024

Sasaran Strategis : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah

Tahun	2023	2024
Target RPJMD	93,92%	94,72%
realisasi	96,77%	98,88%

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Tahun	2023	2024
Target RPJMD	Rp658.724.912.873,00	706.603.687.940,00
Target APBD Perubahan	Rp695.268.581.456,00	781.054.844.583,30
realisasi	Rp803.673.277.480,00	842.865.622.059,51

Capaian kinerja tahun 2024 untuk Akuntabilitas keuangan dan aset daerah meningkat melampaui target yang ditetapkan pada RPJMD sebesar 4,39%. Sedangkan untuk capaian kinerja pendapatan asli daerah meningkat melampaui target 19,28%

3.2.3 Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional/RPJMN serta capaian organisasi/instansi sejenis yang setara

Capaian kinerja BPKAD tidak bisa dibandingkan dengan standar nasional/RPJMN atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau capaian kinerja pemerintah provinsi/Kabupaten/Kota lain secara keseluruhan karena berbeda-beda dalam menentukan indikator dan formula indikatornya, sehingga yang dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya terkait dengan capaian pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah, kontribusi PAD terhadap pendapatan, dan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pemeriksaan laporan keuangan daerah.

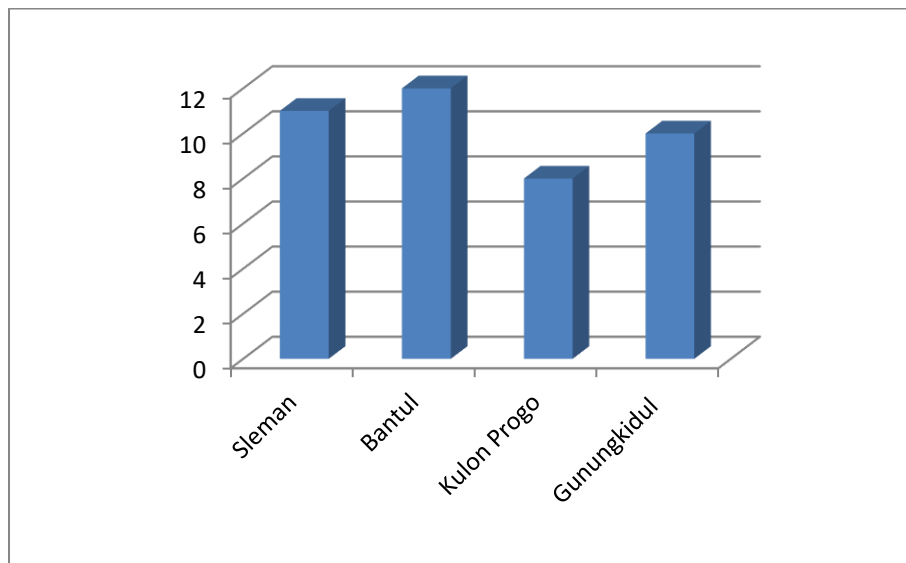
Pendapatan Asli daerah

Perbandingan capaian pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Pendapatan Asli Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain Tahun 2024

	Sleman	Kulon Progo	Gunungkidul	Yogyakarta
Capaian PAD (%)	103,79%	105,06%	103,65%	117,89%

Gambar 3.1
Grafik Perbandingan Capaian Pendapatan Asli Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain Tahun 2024



Dari tabel tersebut Kota Yogyakarta berada di peringkat tertinggi kedua. Hal ini menunjukkan bahwa capaian PAD kota Yogyakarta cukup berhasil.

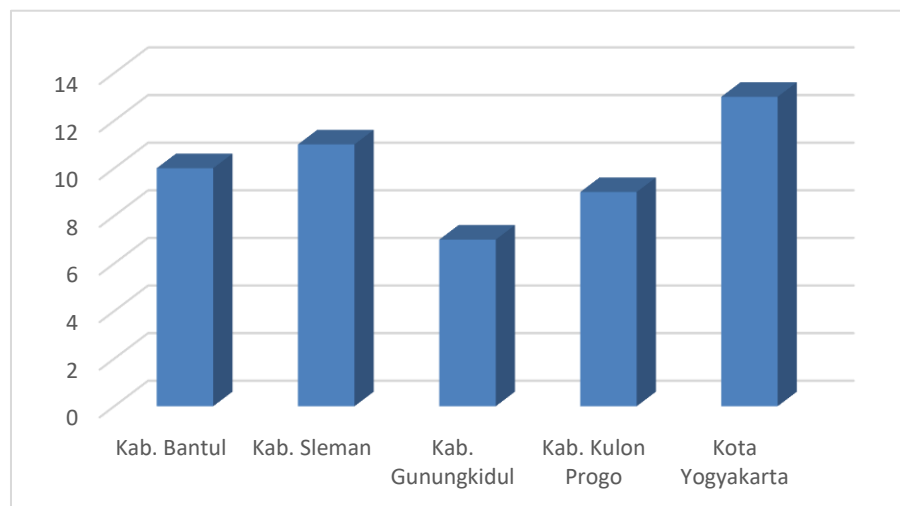
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

Tabel 3.9
Perbandingan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

	Sleman	Kulon Progo	Gunungkidul	Yogyakarta
Kontribusi (%)	9,84	10,53	10,32	10,20

Terlihat bahwa Kota Yogyakarta berada pada posisi pertama untuk kontribusi PAD terhadap pendapatan, dengan capaian sebesar 10,20% disajikan dengan grafik berikut :

Gambar 3.2
Grafik Perbandingan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan

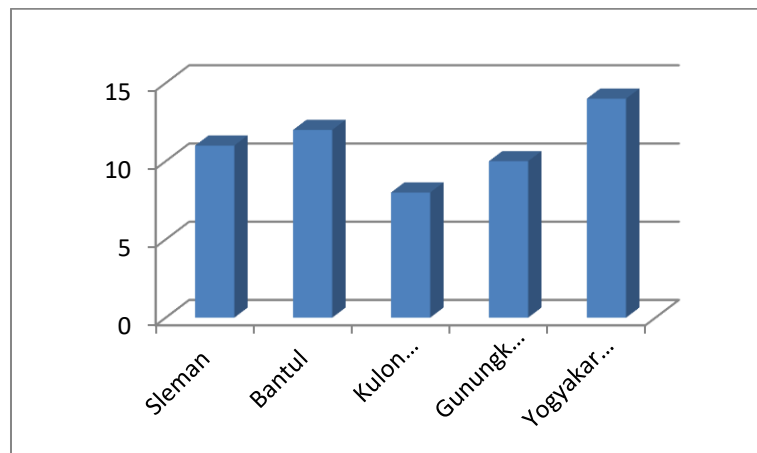


Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Tabel 3.10
Perbandingan Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

	Sleman	Bantul	Kulon Progo	Gunungkidul	Yogyakarta
Jumlah	11	12	8	10	15

Gambar 3.3
Grafik Perbandingan Perolehan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



3.2.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif pemecahan masalah yang telah dilakukan

Upaya yang sudah dilakukan untuk mendukung pencapaian tersebut antara lain :

- a. Memasang alat monitoring di tempat usaha Wajib Pajak
- b. Menerbitkan Surat Teguran terhadap Ketentuan Pajak yang sudah jatuh tempo dan belum melakukan pembayaran
- c. Mengikutsertakan personil untuk ikut Bimbingan Teknis Penagihan Pajak Daerah/Juru Sita diadakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- d. Kerjasama dengan Perangkat Daerah/Institusi lain antara lain dengan :
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Apabila Surat Teguran tidak diindahkan maka dilakukan pemanggilan dan ditangani bersama BPKAD Kota Yogyakarta dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta untuk selanjutnya dibuat Berita

Acara yang berkaitan dengan proses penyelesaian tunggakan dan apabila Berita Acara yang dibuat tidak diindahkan maka dapat dilakukan proses Penegakan Peraturan.

- 2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Apabila Surat Teguran tidak diindahkan maka dapat meminta bantuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melayangkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang bersangkutan bahwa Ijin dapat ditinjau kembali apabila tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kejaksaan Negeri dan POLRESTA Yogyakarta terkait dengan pembinaan wajib pajak.
- 4) Bank BPD DIY terkait fasilitasi pemasangan alat monitoring pajak.

Dalam mengukur capaian indikator “Nilai Pendapatan Asli Daerah” berdasarkan jumlah Pendapatan Asli Daerah tahun 2024. Atas capaian tersebut dapat dinyatakan bahwa pencapaian nilai pajak daerah oleh BPKAD berhasil.

Untuk mendorong kinerja program di BPKAD baik kinerja keuangan maupun kinerja fisik telah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan kepada Bidang-bidang dengan mendasarkan hasil kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan. Hasil perhitungan dari rata-rata hasil kinerja Fisik dan keuangan sebagai berikut :

Tabel 3.11
Hasil penghitungan capaian kinerja untuk pemberian *reward*

No.	Bidang	Capaian
1	Bidang Anggaran	98,97%
2	Bidang Perbendaharaan	99,87%
3	Bidang Akuntansi dan Pelaporan	99,02%
4	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	93,74%
5	Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah	94,94%
6	Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	95,49%
7	Sekretariat	89,63%

3.2.5 Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis Akuntabilitas kinerja BPKAD Kota Yogyakarta tidak terlepas dari implementasi tugas pokok dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi pengelolaan keuangan, asset daerah mulai dari perencanaan, penatausahaan dan pelaporan serta pengelolaan pajak daerah yang meliputi pendapatan yang bersumber dari pajak daerah.

Pencapaian Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta pada tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja yang dilakukan sesuai program dan kegiatan yang bersifat ke dalam yakni mendukung tugas pokok dan fungsi, berupaya untuk selalu meningkatkan profesionalisme di bidang pengelolaan keuangan dan aset dengan melakukan peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian serta perencanaan.
2. Capaian Kinerja program dan kegiatan yang bersifat keluar yaitu menjadi organisasi yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada hasil untuk pemenuhan kebutuhan Pemerintah Kota Yogyakarta. Skala pengukuran ordinal rata-rata

capaian indikator output adalah 98,88% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

3. Dengan hasil capaian kinerja tersebut output dari pekerjaan/kegiatan pelaksanaan sudah sesuai tatakala, baik secara fisik maupun keuangan.

Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta telah melampaui target melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja keuangan dan aset daerah dengan cara meminimalkan permasalahan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pembinaan, sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknik, monitoring, pendampingan kepada Perangkat Daerah secara intensif dan berkelanjutan.

Akuntabilitas Keuangan Pertanggungjawaban baik yang berasal dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung mulai dari perencanaan anggaran, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencapaian realisasi cukup tinggi dikarenakan Belanja Tidak langsung meliputi Belanja Gaji PNSD yang merupakan belanja wajib dan mengikat.

Pencapaian realisasi cukup tinggi disertai dengan pencapaian output dan target output kegiatan sesuai yang ditargetkan. Adapun dari anggaran Belanja Langsung per sasaran program dilihat dari serapan anggaran untuk :

1. Pencapaian realisasi kinerja Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah sebesar 104,39%.
2. Realisasi kinerja Pendapatan Asli Daerah sebesar 119,28%.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa BPKAD berhasil melaksanakan tugas pencapaian sasaran kegiatan yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

3.2.6 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.12
Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator	% Capaian Kinerja (≥100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan aset daerah	104,39%	97,90%	2,10
2	Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	119,28%	95,22%	4,78
3	Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	100,00%	89,63%	10,37

Dari tiga Sasaran strategis, terdapat tiga sasaran yang kinerjanya sudah sesuai atau melebihi target, dengan tingkat efisiensi sebagai berikut :

1. Sasaran Akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat telah mencapai kinerja sebesar 104,39% dengan efisiensi anggaran 2,10. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan untuk semua program.
2. Sasaran Pendapatan Asli Daerah meningkat telah mencapai kinerja sebesar 119,28% dengan efisiensi anggaran 4,78. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui adanya upaya intensif seperti optimalisasi teknologi, melaksanakan pekan pembayaran serta Sistem Monitoring, Pelaporan dan Pembayaran Pajak Daerah Secara Online.
3. Capaian kinerja sasaran Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meningkat tercapai 100%

3.2.7 Inovasi yang mendukung pencapaian kinerja

Dalam rangka pencapaian target kinerja BPKAD melakukan beberapa inovasi terutama yang berkaitan dengan pelayanan terhadap

wajib pajak, berupa aplikasi antara lain membuat aplikasi e-Lelang dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan penjualan barang daerah yang sudah tidak digunakan.

Beberapa aplikasi sedang dikembangkan dan terus-menerus dilakukan penyempurnaan sehingga dapat digunakan sesuai kebutuhan. Pengembangan aplikasi di tahun 2023 antara lain :

1. Pendaftaran wajib pajak baru secara online

Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada pemohon dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak Daerah untuk jenis Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Pemohon melakukan pendaftaran NPWPD dengan mengakses aplikasi e-SPTPD dengan alamat <https://sptpd.jogjakota.go.id>. Selanjutnya setelah permohonan selesai diproses, Wajib Pajak dapat mengunduh secara mandiri dokumen e-NPWPD dan e-SK Pengukuhan Wajib Pajak Daerah.

2. Permohonan layanan Pajak Daerah secara online

Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan Pajak Daerah yang dimohonkan. Sistem e-Layanan Pajak Daerah meliputi fasilitas Permohonan angsuran, pembatalan, restitusi, keringanan Pajak Daerah, dan Penundaan Pembayaran Pajak.

3. Permohonan pelaporan dan pembayaran Pajak Reklame secara online

Pengembangan aplikasi e-SPTPD Pajak Reklame ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan Pajak Reklame.

4. Layanan PBB-P2 secara online

Melalui aplikasi ini Wajib Pajak atau yang dikuasakan dapat mengisi formulir permohonan secara elektronik, mengunggah berkas persyaratan, mendapatkan pemberitahuan secara elektronik apabila permohonan telah selesai diproses dan mengunduh secara mandiri hasil layanan PBB-P2 yang dimohonkan.

Sistem e-Layanan PBB-P2 meliputi permohonan salinan SPPT, pengurangan pajak, SK-NJOP, restitusi, keberatan NJOP, realisasi dan tunggakan wajib pajak PBB-P2, bebas denda keterlambatan pembayaran, dan penundaan pembayaran PBB-P2.

5. Sewa Aset

Dalam rangka percepatan pelayanan sewa aset, pemerintah kota Yogyakarta telah membangun aplikasi sewa aset, sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan sewa dengan mudah, cepat, tepat, transparan dan akuntabel. Pembayaran dilakukan secara non tunai untuk mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi daerah. Sim Sewa Aset dapat diakses pada laman sewa.jogjakota.go.id.

6. e_Lelang

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pemindahtanganan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kota Yogyakarta membangun aplikasi *e-lelang*. *E-lelang* ini merupakan aplikasi yang memberikan pengumuman adanya kegiatan penjualan barang-barang rusak kepada publik, dan memberikan kesempatan kepada semua orang secara adil untuk dapat mengikuti kegiatan lelang penjualan barang-barang rusak tersebut. Setiap orang berkesempatan mengikuti dan mendaftar dan berkompetisi untuk

membeli paket penjualan barang-barang rusak tersebut. Dengan aplikasi ini dapat meningkatkan :

- a. Kinerja pemindahtanganan menjadi lebih cepat;
- b. Transparan; dan
- c. Akuntabel.

E-lelang dapat di akses melalui website :

<https://lelangaset.jogjakota.go.id>

3.2.8 Kolaborasi lintas sektor

Dalam melaksanakan program dan kegiatan BPKAD melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Pada program pengelolaan keuangan daerah, untuk melaksanakan kegiatan penyusunan dokumen penganggaran, BPKAD melibatkan SKPD lain diantaranya BAPPEDA dan Adminbang sebagai Tim Eksaminasi RKA, Tim Verifikasi DPA, Tim Penyusun Standar Harga Jasa, Tim Penyusun Standar Harga Barang.

Selain itu BPKAD juga melibatkan instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai berikut :

1. Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta

Dalam hal host to host data BPHTB dengan data pertanahan dengan tujuan untuk pertukaran data dan informasi, meningkatkan kualitas layanan dan memastikan BPHTB telah lunas dibayarkan sebelum proses balik nama sertifikat.

2. Bank BPD DIY, Bank Jogja, Bank Mandiri, Bank BNI, PT POS Indonesia dalam hal penerimaan pembayaran Pajak Daerah
3. Bank BPD DIY, dalam hal pemasangan alat monitoring dan pelaporan Pajak Daerah secara online.
4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama, dalam hal gelar data Wajib Pajak untuk pertukaran informasi.

5. Kejaksaan Negeri Yogyakarta, dalam hal membantu penagihan tunggakan Pajak Daerah dengan Surat Kuasa Khusus.
6. Ikatan Notaris Indosia (INI) dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dalam hal koordinasi dalam rangka optimalisasi penerimaan BPHTB.
7. Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia
Dalam penyusunan kajian efektifitas dan efisiensi pemasangan alat perekam data transaksi usaha di kota Yogyakarta.

3.3 REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh BPKAD Kota Yogyakarta telah mencapai nilai melebihi target yang di tentukan. Evaluasi telah dilakukan setelah penetapan indikator dan penetapan capaian kinerja. Sesuai dengan substansinya maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan cerminan dari kebijakan, program, manajemen, proses dan ketaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

Evaluasi kinerja BPKAD Kota Yogyakarta dapat diawali dengan penilaian terhadap kinerja kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Pengukuran Kinerja sesuai Rencana Kerja Tahunan dan Indikator Kinerja.

Berdasarkan hasil dari Pengukuran Kinerja Kegiatan dalam suatu program, dapat dilakukan evaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan analisis akuntabilitas kinerja seperti tersebut pada Target dan realisasi dari anggaran dapat tercapai seperti tersebut pada sebagai berikut :

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024
Tabel 3.14

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Aset Daerah meningkat	Indeks pengelolaan keuangan dan asset daerah	94,72	98,88	104,39	13.138.101.214,00	12.427.760.358,00	96,72%
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah meningkat	Nilai Pendapatan Asli Daerah	706.603.687.940,00	842.865.622.059,51	119,28	3.649.018.000,00	3.468.863.656,00	95,06%
3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi oleh Inspektorat	B	B	100,00	53.506.602.502,00	47.957.583.336,00	89,63%
Total Belanja		(tanpa Anggaran Belanja Tidak Terduga dan Transfer)				70.293.721.716,00	63.854.207.350,00	90,84%
Total Belanja						89.240.580.531,81	67.399.269.350,00	75,53%

Target dan Realisasi Anggaran per Kegiatan

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.432.000,00	3.432.000,00	100%
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	43.923.053.500,00	39.045.251.269,00	88,89%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.860.000,00	2.760.000,00	56,79%
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	972.286.335,00	904.125.131,00	92,99%
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.148.711.744,00	7.601.653.833,00	93,29%
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	454.258.923,00	400.361.103,00	88,14%

No	Nama Program	Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	132.701.174,00	131.337.750,00	98,97%
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.516.189.590,00	1.514.220.905,00	99,87%
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	230.234.000,00	227.988.750,00	99,02%
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Pengelolaan Barang Milik Daerah	11.258.976.450,00	10.554.212.953,00	93,74%
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Pengelolaan pendapatan Daerah	3.649.018.000,00	3.468.863.656,00	95,06%
			70.293.721.716,00	63.854.207.350,00	90,84%

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta merupakan pelaksanaan dari Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dalam menyusun Laporan Kinerja berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024, strategis dan kinerja lainnya, serta realisasi keuangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. BPKAD sudah berhasil melakukan optimalisasi dalam pemungutan pajak daerah dengan nilai sebesar 119,28%
2. Berhasil melakukan efisiensi dan mendorong efektivitas belanja daerah yang dibuktikan dengan meraih opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke 15 (lima belas).
3. Berhasil melakukan optimalisasi terhadap pengelolaan aset daerah dalam mewujudkan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang berkualitas sehingga telah terealisasi sebesar 100%.
4. Capaian kinerja pengelolaan keuangan (non strategis) telah mencapai 100% dengan kategori baik.
5. Realisasi anggaran capaian indikator keuangan adalah 98,88% dari target 100% masuk katagori “sangat berhasil”.

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta dilihat dari nilai capaian di atas sehingga termasuk dalam kategori berhasil.

Program dan kegiatan beserta anggaran pada tahun 2024 sangat efektif dan efisien dalam rangka mendukung capaian IKU.

Rencana tindak lanjut dirumuskan sebagai berikut :

1. Dalam menentukan indikator sasaran dan program menggunakan metode penghitungan tertentu sehingga menghasilkan target yang akurat dan valid.
2. Melakukan reviu terhadap target indikator sasaran dengan target indikator program sehingga data yang tersaji menjadi sinkron.
3. Dalam meningkatkan kinerja perlu percepatan peningkatan kualitas kinerja sehingga diperoleh capaian kinerja yang maksimal.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan secara lebih intensif kepada pengurus barang pengguna, pengelola keuangan SKPD dan pelaksana akuntansi SKPD.

Laporan Kinerja BPKAD Kota Yogyakarta Tahun 2024 akan dimanfaatkan oleh pimpinan Perangkat Daerah sebagai impan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja ke depan.